

# NU DALAM PERSINGGUNGAN IDEOLOGI: Menimbang Ulang Moderasi Keislaman Nahdlatul Ulama



istimewa

Ahmad Zainul Hamdi  
Dosen STAIN Ponorogo dan Direktur  
REMONG (Perkumpulan Studi  
Budaya) Pandan Jawa Timur

“Saat ini, Indonesia tengah berada dalam benturan triangulat ideologi dunia. Benturan ideologi inilah yang menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan NU sebagai jam’iyah dan jama’ah terbesar di Indonesia, terutama dari arus gerakan radikalisme agama dan terorisme.”<sup>1</sup>

Pernyataan di atas tertera dalam salah satu buklet yang dibagikan kepada peserta

dan peninjau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama, Juli 2006, di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Buku kecil ini sempat memancing reaksi dari beberapa orang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hadir.<sup>2</sup> Mereka merasa diadili secara tidak fair karena dianggap sebagai kelompok Islam radikal yang menyusup dan membahayakan eksistensi Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini dikenal sebagai penyangga moderasi Islam di Indonesia.

Sekelumit kisah di atas sesungguhnya menghadirkan gambaran tentang keresahan beberapa kalangan muda NU yang di matanya pendulum NU sedang bergerak ke arah kanan. “NU sedang miring ke kanan” adalah ungkapan yang akhir-akhir ini sering kita dengarkan dari sebagian kalangan anak-anak muda NU yang selama ini dikenal progresif.<sup>3</sup> Tentu saja, pernyataan tersebut bukanlah sebuah pernyataan eksplanatif yang dingin-

<sup>1</sup> Team Penyusun, *Ancaman Terhadap Nahdlatul Ulama* (Jakarta: t.p. 2006), hlm. 3.

<sup>2</sup> Untuk menyemarakkan Munas, anak-anak muda NU menggelar diskusi di dekat areal parkir Asrama Haji. Pada saat itu, saya bertindak menjadi moderator diskusi. Pada awalnya, suasana forum sarat dengan keluhan kalangan tua tentang pemikiran anak-anak muda NU yang menurutnya sudah kebablasan. Mereka menyebutnya anak-anak muda NU tersebut sebagai kelompok Islam liberal. Akan tetapi, forum kemudian berubah menjadi perdebatan antara nara sumber (Imam Ghazali Said, Zuhairi Misrawi, dan Khamami Zada) dengan beberapa orang HTI yang turut hadir dalam diskusi tersebut.

<sup>3</sup> Sinyalemen ini memang terkesan terburu-buru, namun bukan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Himbuan Ketua PWNU Jawa Timur yang melarang kiai-kiai NU aktif dalam FPI paling tidak

dingin saja, tapi tersirat di dalamnya sebuah keprihatinan.

Keprihatinan ini setidaknya bisa dipahami dari beberapa hal. NU selama ini dianggap oleh banyak kalangan sebagai penyangga moderasi Islam di Indonesia.<sup>4</sup> Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU selama ini memainkan peran yang signifikan dalam mengusung ide-ide keislaman yang toleran dan damai. Di samping itu, *khittah nahdliyyah* diapresiasi, baik oleh orang luar maupun orang NU sendiri, sebagai sebuah rambu-rambu yang mampu menjaga NU untuk tidak terjebak dalam permainan politik formal. Ini perlu dinyatakan bukan karena orang-orang NU sama sekali tidak ada yang masuk dalam permainan politik praktis, tapi spirit *Khittah 1926* memungkinkan NU untuk tetap konsisten dengan pengakuannya tentang NKRI yang berideologi Pancasila sebagai sesuatu yang final, di mana pengakuan ini akan menjaga NU dari kemungkinan berkolaborasi dengan kalangan Islamis.

Betulkah saat ini NU telah merapat ke kaum Islamis sebagaimana yang diutarakan oleh sebagian kalangan? Pertanyaan ini penting karena kalau jawabannya 'ya', maka ketika kita berbicara tentang radikalisasi Islam di Indonesia, kita tidak bisa lagi menyatakan bahwa

jumlah Muslim radikal di Indonesia tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah Muslim moderat yang ada di NU (dan Muhammadiyah) yang mencapai puluhan juta orang.<sup>5</sup> Seseorang yang memperbincangkan tentang Islam radikal di Indonesia juga harus mempertimbangkan "merembesnya" semangat Islamis ke dalam ormas-ormas keislaman yang selama ini dianggap toleran dan moderat seperti NU.

Tulisan ini berupaya untuk mengeksplorasi beberapa sikap yang diambil oleh NU yang karenanya muncul anggapan tentang mulai mendekatnya NU ke kalangan Islamis-konservatif. Dalam beberapa hal, anggapan di atas mungkin benar, akan tetapi hal itu juga agak terburu-buru. Yang jarang dilihat oleh orang-orang yang menganalisis sikap NU akhir-akhir ini adalah "ketersinggungan" ulama terhadap kalangan Muslim liberal yang dianggap telah melakukan delegitimasi intelektual dan moral para ulama. Sikap NU yang tampak keras terhadap gagasan-gagasan yang diusung kalangan Muslim liberal adalah bentuk reaksi ulama yang hendak menjaga otoritas keilmuannya. Pada saat yang sama, sikap ini berkelindan dengan adanya friksi di kalangan elit NU. Organisasi keislaman seperti NU, di mana bahasa agama

---

menunjukkan mulai merembesnya fundamentalisme Islam ke dalam tubuh NU. Perlu juga diingat bahwa Jawa Timur adalah basis utama NU secara nasional. Dari 30-40 juta anggota NU, mayoritas berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

<sup>4</sup> Lihat Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2000).



dianggap lebih otoritatif dan efektif dalam menyelesaikan masalah daripada melalui cara-cara organisasi modern, sering mentransformasikan konflik politik menjadi konflik keagamaan atau kuasi-keagamaan. Kita mungkin bisa membayangkan kasus NU ini seperti munculnya aliran-aliran teologi Islam yang merupakan tahap berikutnya dari pertikaian politik yang pada awalnya bersifat duniawi.

### “Islamis” dan “Islam Liberal”

Istilah “Islamis” yang digunakan di sini merujuk pada orang atau kelompok yang memperlakukan Islam sebagai satu doktrin yang tetap. Bagi mereka, Islam memberikan panduan pelaksanaan dan teknis untuk seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, maka pemahaman keislaman kalangan Islamis cenderung literalis. Komitmen mereka terhadap Islam dan pemahamannya yang literal atas Islam membawanya menjadi aktivis yang berusaha untuk membangun masyarakat dan negara Islam yang sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan generasi salaf.

Dalam konteks Indonesia, Fealy mencatat bahwa kalangan Islamis meng-

inginkan Islam mendapatkan status istimewa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka berupaya agar syariat Islam bisa diimplementasikan, atau dengan kata lain, menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif. Semangat inilah yang mendasari usulan mereka agar presiden adalah seorang Muslim. Sekalipun terkesan artifisial, tapi kalangan Islamis juga gemar memasukkan istilah-istilah Arab ke dalam undang-undang atau peraturan dalam rangka memberi cita rasa Islam dalam kehidupan bernegara. Ada dua alasan utama yang seringkali mereka lontarkan untuk membenarkan posisi religio-politiknya. *Pertama*, undang-undang negara harus mencerminkan kenyataan bahwa umat Islam adalah mayoritas. *Kedua*, hukum Islam adalah wahyu Tuhan yang lebih terjamin kebenaran dan kebaikannya daripada hukum buatan manusia.<sup>6</sup>

Sementara, istilah “Islam liberal” yang sangat banyak dibicarakan dalam artikel ini merujuk pada jenis pemahaman keislaman yang ingin menerobos batas-batas makna tekstual wahyu. Bagi Muslim liberal, kata-kata Al-Qur’an tidak secara langsung mengungkapkan substansi pewahyuan sehingga dibutuhkan upaya-

<sup>5</sup> Pernyataan ini, misalnya, pernah dilontarkan oleh Greg Fealy dkk. Menurutnya, pembicaraan tentang Islam radikal di Indonesia terlalu dibesar-besarkan karena Islam radikal hanyalah titik kecil dari Islam moderat yang merupakan arus utama Islam Indonesia. Pandangan seperti ini didasarkan atas jumlah Muslim radikal yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah anggota NU dan Muhammadiyah yang mencapai puluhan juta. Lihat Greg Fealy, dkk., “Indonesia,” dalam Greg Fealy and Virginia Hooker (eds.), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*, (Singapura: ISEAS, 2006), hlm. 50.

<sup>6</sup> Greg Fealy and Virginia Hooker (eds.), *Voices of Islam...*, hlm. 46-47.

upaya intelektual untuk mencari apa yang hendak diwahyukan melalui kata-kata. Di sinilah aspek rasio menjadi sangat penting dalam bangunan pemikiran Islam liberal. Sebegitu dominannya penggunaan rasio ini bagi Muslim liberal sehingga mereka tidak jarang “menerabas” batas-batas yang telah ditentukan oleh *nash qath’i*, batas yang di mata ulama dan kalangan Islamis tidak boleh dilampaui. Wacana rasional dalam Islam liberal bertujuan untuk menyelaraskan pesan Islam dengan kondisi kehidupan kontemporer secara wajar.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, maka Islam liberal di dalam tulisan ini tidak semata-mata menunjuk pada Komunitas Islam Utan Kayu dengan proyek Jaringan Islam Liberal (JIL)-nya. Dalam konteks Indonesia, Islam liberal sebagaimana pengertian di atas adalah seluruh gerakan pembaharuan pemikiran keislaman yang akarnya bisa dilacak sejak tahun 1970-an yang dikomandoi oleh beberapa intelektual Muslim, misalnya, Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Dengan tekanan isu dan pilihan gerakan yang berbeda, dua orang ini memperkenalkan pemikiran keislaman yang mengguncang karena keberaniannya untuk keluar dari batas-batas teks dalam rangka menyelesaikan problem umat Islam dalam situasi kehidupan kontemporer.

Sepanjang Islam liberal merujuk pada

upaya intelektual untuk mengkritik dan mentransformasi berbagai praktik dan pemikiran keislaman dengan menawarkan pendekatan dan cara penafsiran baru yang bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu dan problem-problem yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan kontemporer, maka JIL hanyalah salah satu gugusan yang tampak paling menonjol karena langsung menggunakan istilah “liberal” sebagai label. Sejauh istilah “Islam liberal” diperbincangkan di kalangan elit NU yang menolaknya, maka yang menjadi target tidak hanya Ulil dengan JIL-nya, tapi juga setiap gagasan keislaman yang keluar dari wacana keislaman baku yang tertera dalam warisan keislaman klasik. Tidak mengherankan jika serangan terhadap Islam Liberal juga dirasakan oleh LKiS, P3M, Rahima, Lakpesdam, PMII, dan berbagai komponen lain—rata-rata digawangi oleh anak-anak muda—yang selama ini aktif mengusung gagasan-gagasan keislaman progresif.

### NU dan Agenda Kalangan Islamis-Konservatif

Paling tidak, ada dua isu besar yang bisa dijadikan titik tolak untuk mengukur kedekatan NU dengan kalangan Islamis. Dua isu tersebut adalah dukungan NU terhadap RUU APP (Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi) dan Perda/Raperda Syariat Islam.

<sup>7</sup> Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, terj. Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 5-6.



## RUU APP

RUU ini telah menjadi perdebatan yang sengit baik di dalam maupun di luar parlemen. Kalangan Muslim liberal dan nasionalis sekuler rata-rata menolak RUU ini. Dengan berbagai argumen yang mereka lontarkan, secara umum kalangan ini melihat RUU APP sebagai upaya yang sudah tampak vulgar dari kalangan Islamis untuk mensyariatkan Indonesia. Sementara, kalangan Islamis yang mendukung RUU ini berdalih bahwa RUU tersebut sama sekali bukan sebagai upaya untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia, tapi semata-mata untuk menyelesaikan problem moral yang semakin mengkhawatirkan.

Pada 22 April 2006, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengkoordinasi pawai Bhinneka Tunggal Ika untuk menolak RUU APP. Pawai ini menimbulkan kemarahan kelompok pendukung RUU APP. Ketua Forum Betawi Rempug, Fadholi El Muhiir, misalnya, dalam dialog di Metro TV, 1 Mei 2006, menyatakan bahwa perempuan yang tergabung dalam pawai tersebut tidak lain adalah iblis. Pernyataan Fadholi tersebut akhirnya menimbulkan perseteruan hukum antara Sinta Nuriyah dengan Fadholi.<sup>8</sup>

Gus Dur yang selama ini terkenal dengan gagasan-gagasan keislamannya yang liberal juga menunjukkan penen-



indonesiamatters.com

DEMO Penolakan RUU APP

tangannya yang keras dan terbuka terhadap RUU APP. Dikarenakan pandangannya dalam masalah pornografi,<sup>9</sup> Gus Dur diserbu oleh puluhan massa gabungan MMI, FPI, HTI, dan FUI ketika menjadi *keynote speaker* di acara Dialog Lintas Etnis dan Agama, 23 Mei 2006, di Purwakarta.<sup>10</sup> Buntut dari peristiwa ini adalah tindakan balasan para pendukung

<sup>8</sup> *Kompas*, Sabtu, 20 Mei 2006.

<sup>9</sup> Gus Dur dilaporkan oleh FUI ke polisi dengan tuduhan penodaan terhadap agama Islam. Laporan ini terkait dengan pernyataan Gus Dur bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci "porno". *Kompas*, Rabu, 14 Juni 2006.

<sup>10</sup> *Surya*, Rabu, 24 Mei 2006.

Gus Dur terhadap MMI dan FPI. Bahkan, aksi ini sampai menimbulkan bentrok fisik antara pendukung Gus Dur dengan FPI di Jember.<sup>11</sup>

Dalam situasi konfliktual seperti ini, Minggu, 21 Mei 2006, K.H. Ma'ruf Amin, Rois Syuriah PBNU yang juga menjadi Ketua Tim Pengawal RUU APP dan Ketua Komisi Fatwa MUI menggelar demonstrasi yang mendesak parlemen agar secepatnya mensahkan RUU APP. Demonstrasi ini tidak hanya didukung oleh ormas-ormas keislaman yang selama ini dikenal sebagai kelompok Islamis-konservatif, tapi juga oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua ormas keislaman yang selama ini mengusung bendera Islam moderat di Indonesia. Bahkan, K.H. Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin tampak berada di antara lautan massa yang sedang berunjuk rasa.<sup>12</sup>

Dengan bergabungnya NU ke dalam barisan pendukung RUU APP, di mana RUU APP telah dipersepsi sebagai agenda politik kalangan Islamis-konservatif, maka banyak orang yang kesulitan untuk menemukan kelompok moderat yang selama ini biasanya diisi oleh NU (dan Muhammadiyah). Seakan-akan garis demarkasi telah terpancang sedemikian tebal sehingga yang ada hanya Muslim liberal (plus nasionalis sekuler) dan Islamis-

konservatif. Ketika terjadi konflik antara Gus Dur dengan kalangan Islamis-konservatif, banyak yang berharap NU "mundur" dari koalisinya dengan kalangan Islamis karena bagaimanapun juga Gus Dur tetaplah tokoh NU yang memiliki pendukung fanatik, namun pernyataan K.H. Hasyim Muzadi mengindikasikan sebaliknya. Ia justru menghimbau agar Gus Dur tidak sering mengeluarkan pernyataan yang memancing reaksi balik dari lawan-lawannya.<sup>13</sup> Pernyataan Hasyim ini seakan membenarkan pengakuan Fauzan al-Anshori, Ketua Departemen Dakwah dan Informasi MMI, bahwa penyerbuan Gus Dur di Purwakarta adalah reaksi dari pernyataan Gus Dur yang dirasa menghina umat Islam.<sup>14</sup> Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh Ismail Yusanto (HTI), Mashadi (FUI) dan Ma'ruf Amin (MUI) dalam jumpa persnya di Jakarta bahwa aksi di Purwakarta semata-mata karena terprovokasi oleh pernyataan Gus Dur sendiri.<sup>15</sup>

Dengan mempertimbangan bahwa RUU APP selama ini telah dipersepsi sebagai agenda kalangan Islamis, maka rasanya tinggal selangkah saja untuk menilai NU telah menjadi komponen aktif gerbong Islamis. Penilaian ini tidak lagi terfokus pada K.H. Hasyim Muzadi dan K.H. Ma'ruf Amin, tapi NU secara

<sup>11</sup> *Jawa Pos*, Sabtu, 27 Mei 2006.

<sup>12</sup> *Kompas*, Senin, 22 Mei 2006.

<sup>13</sup> *Kompas*, Sabtu, 27 Mei 2006.

<sup>14</sup> *Kompas*, Rabu, 24 Mei 2006.

<sup>15</sup> *Kompas*, Sabtu, 27 Mei 2006.



keseluruhan karena satu minggu sebelum demonstrasi mendukung RUU APP, tepatnya pada 14 Mei 2006, tiga puluh tujuh ulama NU yang mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden di Pesantren Tebuireng, Jombang, juga meminta agar RUU APP secepatnya direalisasikan.<sup>16</sup> Di samping itu, PBNU juga secara resmi menghimbau organisasi-organisasi di bawah naungannya untuk menyesuaikan sikap dengan PBNU.

### Perda/Raperda (Peraturan/Rancangan Peraturan Daerah) Syariat Islam

Tokoh-tokoh Islam yang selama ini konsen dengan pluralisme memandang Perda Syariat Islam potensial melahirkan disintegrasi bangsa. Syafi'i Ma'arif, misalnya, menilai Perda Syariat memicu konflik antarsesama anak bangsa. Menurutnya, Perda Syariat hanyalah luapan emosional di tengah situasi euforia reformasi sehingga tidak akan bertahan lama karena tidak melalui kajian yang mendalam. "Kalau Perda itu menimbulkan ketidakrukunan, kerusakan hubungan, harus ditinjau kembali. Ini kan sekarang euforia dan itu tidak lama. Mereka akan kesulitan sendiri melaksanakannya dengan aparat seperti sekarang ini. Di Aceh saja banyak tulisan Arab, tetapi ganja juga banyak."<sup>19</sup>

Sementara, kalangan Islamis yang

menjadi pendukung utama Perda Syariat menyandarkan alasannya pada spirit Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* sehingga tidak mungkin mendiskriminasi kelompok minoritas. Di samping itu, kalangan ini juga melihat syariat Islam sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan krisis yang melanda Indonesia yang belum sepenuhnya bisa diatasi. Ungkapan Abu Bakar Ba'asyir adalah gambaran jelas posisi kalangan ini. Menurutnya, "...hanya dengan menjalankan syariat Islam Indonesia bisa selamat dari keterpurukan.... Syariat Islam itu harga mati."<sup>20</sup>

Lalu, di mana posisi NU? Dengan melihat sikap NU yang selama ini sangat konsisten dengan pengakuannya bahwa NKRI dan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang final, banyak orang berharap NU akan menjadi kekuatan yang signifikan dalam membendung upaya syariatisasi Indonesia yang dilakukan kalangan Islamis. Akan tetapi, harapan ini menjadi sia-sia ketika NU memberikan dukungannya terhadap Perda-Perda antimaksiat yang dicurigai oleh kalangan Muslim liberal dan nasionalis sekuler sebagai agenda penerapan syariat Islam oleh kalangan Islamis-konservatif itu.

Pada Juni 2006, terjadi pertemuan di kantor MUI yang dihadiri oleh FPI, HTI, FBR, PBNU, DDII dan Asyafi'iyah.

<sup>16</sup> *Kompas*, Senin 15 Mei 2006.

<sup>17</sup> Dikutip dari *Jawa Pos*, Rabu, 14 Juni 2006.

<sup>18</sup> *Jawa Pos*, Minggu, 2 Juli 2006.

<sup>19</sup> *Kompas*, Kamis, 15 Juni 2006.

<sup>20</sup> *Duta Masyarakat*, 1 Juli 2006.

Pertemuan tersebut mengeluarkan deklarasi umat Islam yang intinya adalah menjalin koordinasi antar sesama ormas Islam dalam bersikap dan bertindak. Setelah pertemuan tersebut, ketua DPP HTI, Muhammad al-Khaththath menyatakan bahwa sasaran jangka pendeknya adalah mendukung dan mengawal RUU APP, mendukung terciptanya Perda syariat Islam di seluruh wilayah NKRI.

Apakah ini hanya klaim sepihak HTI ataukah ini juga sikap yang dimiliki NU? Sikap NU bisa dilihat pada pernyataan K.H. Hasyim Muzadi bahwa Perda-Perda yang dianggap sebagai Perda syariat Islam adalah Perda antimaksiat yang hanya menegaskan apa yang sudah ada di dalam KUHP sehingga tidak perlu dicurigai, bahkan harus didukung. Penolakan terhadap Perda tersebut hanyalah ekspresi sikap Islamophobia.<sup>21</sup> Pernyataan K.H. Hasyim tersebut sama dengan apa yang dilontarkan oleh K.H. Ma'ruf Amin, bahwa sampai saat ini, di Indonesia tidak ada Perda syariat Islam. Yang ada adalah Perda antimaksiat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai syari'ah dalam rangka untuk kebaikan masyarakat.<sup>22</sup>

Andi Jamaro, salah seorang Ketua PBNU, juga memberikan argumen yang sama tentang dukungan NU terhadap Perda tersebut. Menurutnya, Perda-Perda tersebut sebenarnya adalah untuk menciptakan kebaikan bersama. Perda-Perda

antimaksiat, misalnya, tidak bisa dipandang semata-mata sebagai pemberlakuan hukum Islam karena tidak ada satu pun agama yang membolehkan kemaksiatan. Baginya, adalah sah Perda tersebut mengambil landasannya dari syariat Islam karena memang Islam mengatur semua kehidupan manusia. Di samping itu, Islam adalah agama wahyu sehingga wajar kalau Perda yang dibuat manusia merujuk pada wahyu.<sup>23</sup>

Mungkin ada benarnya bahwa Perda antimaksiat tidak dengan sendirinya bertentangan dengan undang-undang di atasnya, misalnya, KUHP. Yang mungkin tidak disadari oleh PBNU adalah bahwa Perda-Perda tersebut adalah bagian dari agenda besar kalangan Islamis untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Hal ini bisa dilihat pada pernyataan Abu Bakar Ba'asyir bahwa, "Umat Islam yang menolak syariat Islam berada dalam kebodohan. .... Lebih baik lagi kalau dasar Negara diganti dengan kalimat tauhid *Lâ Ilâha Illa Allâh*, karena itu lebih tegas."<sup>24</sup> Idealisme Ba'asyir tersebut bukan sesuatu yang baru. Keinginan untuk mengimplementasikan syariat Islam di Indonesia dalam rangka mentransformasikan Indonesia menjadi Negara Islam telah dilontarkan secara terbuka sejak Kongres Mujahidin pada Agustus 2000 di Yogyakarta. Untuk mencapai keinginannya tersebut, salah satu strateginya adalah

<sup>21</sup> Jawa Pos, Kamis, 22 Juni 2006.

<sup>22</sup> [islamliberal@yahoogroups.com](mailto:islamliberal@yahoogroups.com), 10 Juli 2006.

<sup>23</sup> Jawa Pos, Kamis, 15 Juni 2006.



mendorong partai-partai Islam untuk serius memperjuangkan pelaksanaan syariat Islam.<sup>25</sup>

Melihat retorika yang dikembangkan oleh para elit NU di atas, seakan kita mendengar suara kalangan Islamis yang selama ini memang getol mengupayakan implementasi syariat Islam di Indonesia. Tidak mengherankan jika kemudian banyak kalangan yang heran bagaimana mungkin NU bisa begitu jauh masuk dalam alur pemikiran keislaman yang dikembangkan oleh kalangan Islamis.

Akan tetapi, posisi NU yang seakan-akan telah masuk dalam barisan kalangan Islamis tersebut tetap menyisakan tanda tanya. Hal ini dikarenakan pada saat yang sama, dari dalam NU juga terdengar suara-suara yang melihat aspirasi pemberlakuan syariat Islam bukanlah aspirasi NU. Misalnya, Ali Maschan, Ketua PWNU Jawa Timur, menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan Perda syariat Islam karena gagasan itu tidak menyelesaikan problem masyarakat yang sesungguhnya, tapi justru melahirkan konflik dan menghabiskan energi. Dia mengingatkan kembali sikap kiai-kiai dalam Mukhtamar NU 1983 bahwa NKRI adalah final.<sup>26</sup> Oleh karena itu, "NU tidak berjuang untuk memberlakukan syariat Islam dalam konteks bernegara. Tapi mendorong

pelaksanaannya secara individu."<sup>27</sup> Jika PBNU terkesan akur dengan kalangan Islamis, Ali Maschan justru memandang kalangan tersebut sebagai satu bentuk ancaman. "Mereka *ngebom*, mereka menghancurkan masjid Ahmadiyah sembari mengucap takbir Allahu Akbar," untkapnya.<sup>28</sup>

### Friksi Intern Elit NU

Muktamar NU ke-31 di Solo, November-Desember 2004, ditandai oleh dua isu besar: persetujuan antara Gus Dur versus K.H. Hasyim Muzadi dan penolakan "*muktamirin*" terhadap Islam liberal. Dua isu tersebut tidak berdiri secara terpisah. Dengan mudah, orang bisa menangkap kesan bahwa isu Islam liberal menjadi garis yang memisahkan antara kubu Gus Dur dan K.H. Hasyim. Dalam konteks Mukhtamar, secara umum bisa dikatakan bahwa penolak wacana Islam liberal datang dari kubu K.H. Hasyim. Sekalipun mungkin ada kiai-kiai pendukung Gus Dur yang tidak setuju terhadap Islam liberal, setidaknya mereka tidak melontarkan atau mengekspresikan penolakannya secara langsung ke publik.

Gus Dur yang selama ini dikenal dengan berbagai lontaran pemikiran yang "*nyeleneh*", dicitrakan—paling tidak oleh kubu Hasyim—sebagai patron dari gagap

<sup>24</sup> *Tempo*, 5 November 2006, hlm. 31.

<sup>25</sup> Irfan S. Awwas (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syari'ah Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hlm. 145.

<sup>26</sup> *Jawa Pos*, Sabtu, 24 Juni 2006.

<sup>27</sup> *Tempo*, 5 November 2006, hlm. 31.

<sup>28</sup> *Tempo*, 5 November 2006, hlm. 31.

gempita Islam liberal yang saat itu sedang dalam kontroversi. Gus Dur sendiri tampak tidak membantah pencitraan tersebut.<sup>29</sup> Dengan mengidentifikasi Gus Dur sebagai patron Islam liberal, maka penolakan kubu Hasyim terhadap Islam liberal sesungguhnya adalah ekspresi dari perseteruannya dengan Gus Dur. Hasyim memanfaatkan sentimen para kiai yang mulai gerah dengan gagasan-gagasan yang diusung oleh kalangan Muslim liberal yang dianggap sudah kebablasan.<sup>30</sup>

Pada saat yang sama, rata-rata kalangan muda NU juga menentang pencalonan kembali Hasyim sebagai Ketua Umum PBNU untuk yang kedua kali. Alasan penolakan anak-anak muda ini adalah karena K.H. Hasyim telah menyeret NU ke dalam permainan politik praktis. Perseteruan kubu K.H. Hasyim dengan anak-anak muda mulai terbuka ketika K.H. Hasyim mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Berbagai pertemuan dilakukan anak-anak muda untuk “menyelamatkan” NU dari permainan politik elit-elitnya. Musyawarah Besar Warga NU

di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, pada tanggal 8–10 Oktober 2004 sampai pada pendirian posko NCC (NU Crisis Center) di arena Mukhtar adalah bagian dari gerakan anak-anak muda NU yang membuatnya pada posisi berhadapan dengan kubu K.H. Hasyim. Karena posisinya yang berlawanan dengan kubu K.H. Hasyim serta dianggap sebagai hasil didikan Gus Dur dalam hal pemikiran dan gerakan, anak-anak muda ini pun tidak luput dari stigma sebagai gerakan Islam liberal.

Jadi, isu Islam liberal di arena Mukhtar sesungguhnya adalah bola panas yang sedang dilempar dalam kaitannya dengan perseteruan antara Gus Dur dan K.H. Hasyim. Tidak mengherankan jika munculnya isu Islam liberal disertai dengan isu lain, yaitu pelarangan orang-orang Islam liberal menjadi pengurus PBNU. Ini menunjukkan bahwa isu Islam liberal sesungguhnya sedang dikelola dalam rangka untuk memblokir Gus Dur dan para pendukungnya.

Mukhtar NU di Solo bisa dikatakan

---

<sup>29</sup> Ketika artikel Ulil tentang “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” yang dimuat di Kompas, 18 November 2002, menjadi kontroversi yang panas, Gus Dur secara terbuka memberikan dukungan terhadap gagasan-gagasan Ulil melalui artikelnya yang dimuat di website pribadinya. Baca Abdurrahman Wahid, “Ulil Abshar-Abdalla dengan Liberalismenya,” dalam Dzulmanni (ed.), *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005).

<sup>30</sup> Kegerahan para kiai terhadap gagasan-gagasan keislaman liberal sesungguhnya bukan fenomena baru. Sejak awal, banyak kiai yang merasa terusik dengan berbagai perilaku dan pikiran keagamaan yang dilakukan dan dilontarkan Gus Dur. Akan tetapi, kegelisahan para kiai tersebut tidak pernah berubah menjadi sebuah gerakan penentangan terhadap Gus Dur. Di samping karena pendekatan yang dilakukan Gus Dur terhadap kiai-kiai, posisinya sebagai Ketua Umum PBNU sekaligus cucu Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari memberinya otoritas ekstra untuk berbicara atas nama NU dan Islam. Tentang kegelisahan kiai-kiai terhadap pikiran Gus Dur dan cara Gus Dur menyelesaikannya, baca Imron Hamzah & Choirul Anam (peny.), *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai: Sebuah Dialog Mencari Kejelasan* (Surabaya: Jawa Pos, 1989).





ahisiam.org

sebagai panggung terbuka dan puncak perseteruan antara Gus Dur dengan Hasyim setelah sekian waktu terjadi ketegangan di antara keduanya. Konflik keduanya bisa dilacak sejak akhir masa kepresidenan Gus Dur. Dalam masa kepresidenannya yang sangat singkat, Gus Dur tidak hanya disibukkan dengan urusan menata ekonomi dan politik nasional, tapi juga serangan musuh-musuh politiknya. Saat itu, Gus Dur merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari NU yang diketuai oleh K.H. Hasyim Muzadi. Bahkan, ketika Gus Dur memecat Matori dari posisinya sebagai Ketua Umum DPP PKB karena dianggap turut melakukan *impeachment* dan mem-

bangun *deal* politik dengan Megawati, yang akhirnya PKB terpecah menjadi dua, K.H. Hasyim Muzadi juga tidak mengambil sikap yang tegas. Ketidaktegasan sikap Hasyim semakin meyakinkan Gus Dur bahwa K.H. Hasyim tidak memberi dukungan dan mengamankan posisinya melalui gerbong NU ketika ia menjabat sebagai presiden.

Konflik diam-diam ini menjadi terbuka ketika K.H. Hasyim Muzadi mencalonkan diri sebagai Wapres bergandengan dengan Megawati untuk periode 2004-2009. Gus Dur begitu bersemangat untuk menjegal langkah K.H. Hasyim. Persesteruan tidak mungkin lagi untuk ditutupi. Bahkan, ketika beberapa orang berinisiatif untuk mendamaikan keduanya, Gus Dur secara vulgar menyatakan bahwa tidak mungkin dirinya dengan K.H. Hasyim melakukan *islah* (berdamai) karena antara dirinya dengan K.H. Hasyim ibarat polisi dan pencuri. Sebagaimana yang disinggung di atas, kalangan muda NU juga menentang pencalonan K.H. Hasyim karena dianggap mengkhianati khittah 1926 dan akan menjerumuskan NU dalam permainan politik praktis sehingga kerja-kerja sosial NU akan terbengkalai kembali.<sup>31</sup>

Kasus yang sama juga bisa kita lihat

<sup>31</sup> Dengan melihat beberapa fakta di lapangan, tuduhan beberapa pihak bahwa K.H. Hasyim Muzadi memanfaatkan struktur organisasi NU untuk meraih dukungan massa dalam pencalonannya sebagai calon Wapres berpasangan dengan Megawati bukan tidak bisa dibenarkan. Bisa dikatakan bahwa hampir seluruh struktur organisasi NU di semua level digunakan untuk melakukan kerja-kerja politik dalam rangka mendukung "sang calon dari NU" tersebut. Sekalipun kalangan pengurus NU menutupi perilaku politik ini dengan menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam kapasitasnya secara pribadi, namun perilaku yang massif ini akhirnya menyeret institusi NU dalam permainan politik secara langsung

pada diri K.H. Ma'ruf Amin. Banyak kalangan yang heran dengan perubahan sikap keberagamaan K.H. Ma'ruf yang tiba-tiba sangat diametral dengan Gus Dur. Keheranan ini logis dengan mempertimbangkan sikap keislaman K.H. Ma'ruf selama ini yang sejalan dengan *mainstream* pemikiran keislaman NU, yaitu moderat dan pluralis. Sekalipun tidak bisa dianggap sebagai tokoh Muslim liberal, namun selama ini tidak pernah terdengar suara K.H. Ma'ruf yang menyatakan keberatannya atas ide-ide yang disemai oleh kalangan Muslim liberal. Akan tetapi, tiba-tiba K.H. Ma'ruf menjadi juru bicara yang paling fasih dari kelompok yang menentang pemikiran dan praktik keagamaan yang dengan mudah diatribusikan ke Gus Dur, misalnya, liberasi pemikiran keislaman, pluralisme, sekularisme, doa bersama lintas agama, dll. Sekalipun hal ini dilakukan K.H. Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, namun dengan melihat kasus RUU APP dan Perda syariat Islam, orang dengan mudah melihat tidak adanya

dinding yang membatasi antara K.H. Ma'ruf sebagai orang MUI dan sebagai Rais Syuriah PBNU.

Sebagaimana K.H. Hasyim, K.H. Ma'ruf pada awalnya memiliki hubungan yang dekat dengan Gus Dur. Pada awal pembentukan PKB, K.H. Ma'ruf Amin sangat dekat dengan Gus Dur. Bahkan, K.H. Ma'ruf sempat menjadi anggota DPR RI wakil dari PKB. Namun, dalam Pemilu 2004, K.H. Ma'ruf Amin tidak masuk dalam daftar calon legislatif yang diusulkan PKB. Dengan melihat posisi Gus Dur yang sangat menentukan dalam PKB, adalah wajar jika K.H. Ma'ruf merasa bahwa ini adalah ulah Gus Dur. Mulailah timbul perselisihan diam-diam antar keduanya. Puncaknya adalah ketika terjadi Muk-tamar PKB 2005 di Semarang. Saat itu, K.H. Ma'ruf Amin dicalonkan oleh beberapa kiai untuk menjadi calon ketua Dewan Syuro PKB menggantikan Gus Dur. Pencalonan ini jelas memunculkan rivalitas terbuka antara dirinya dengan Gus Dur. Dari sinilah akar perselisihan antara K.H. Ma'ruf dengan Gus Dur terjadi

---

dan telanjang. Bahkan, keterlibatan NU itu tidak jarang sengaja ditampilkan secara terbuka untuk menyentuh sentimen pemilih dari warga NU agar memilih K.H. Hasyim Muzadi sebagaimana terlihat dalam CD yang diedarkan di semua PCNU di Jawa Timur yang berisi kampanye politik K.H. Hasyim Muzadi yang dikemas dalam silaturrahi NU Jawa Timur. Bahkan, cara-cara yang vulgar seperti ini juga dipublikasikan melalui JTV, TV lokal Jawa Timur. Salah seorang kiai di Jember menyatakan pada saya bahwa seluruh dukungan terhadap Mega-Hasyim dilakukan dengan menggunakan level-level struktural NU. Salah seorang di antaranya bahkan dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatan para pengurus menjadi tim sukses K.H. Hasyim tidak melibatkan institusi NU adalah bohong karena seluruh aktivitas itu dilakukan di dalam dan menggunakan simbol-simbol dan sentimen-sentimen NU. Di salah satu MWCNU di Kabupaten Ponorogo ditemukan surat himbauan kepada warga NU untuk memilih Mega-Hasyim dengan surat berkop MWCNU yang bersangkutan.



yang kemudian merembet dengan menghancurkan basis-basis kekuatan Gus Dur di NU.<sup>32</sup>

Mungkin ini terlihat sederhana, tapi beginilah “rumus perang”. Musuh harus dikalahkan dari basis utama kekuatannya. Salah satu basis utama kekuatan Gus Dur adalah pada gagasan-gagasannya yang mempesona dan memberi inspirasi yang begitu kuat, terutama pada kalangan muda NU. Anggapan sebagian nahdliyin tentang kewalian Gus Dur salah satunya juga dipicu dari “keganjilan” perilaku dan pemikiran keagamaannya. Perseteruan pribadi antara K.H. Hasyim dengan Gus Dur di satu pihak dan K.H. Ma’ruf dengan Gus Dur di pihak lain membuat K.H. Hasyim dan K.H. Ma’ruf berada dalam satu kubu. Keduanya akhirnya berada di seberang Gus Dur secara berhadapan, dan mulailah keduanya mendelegitimasi basis kekuatan Gus Dur. Pengambilan posisi yang berseberangan dengan Gus Dur memudahkan keduanya untuk mendekat ke orang-orang kanan yang selama ini memang bermusuhan dengan gagasan-gagasan pembaharuan keislaman yang diusung oleh Gus Dur.

Dari sini bisa dijelaskan bahwa serangan K.H. Hasyim dan K.H. Ma’ruf terhadap Islam liberal sesungguhnya adalah bagian dari upayanya untuk

mendelegitimasi Gus Dur. Kecondongan-nya terhadap kalangan Islamis serta dukungannya terhadap agenda-agenda kalangan Islamis adalah bagian dari paket perlawanannya terhadap Gus Dur. Oleh karena itu, maka kasus RUU APP dan Perda syariat Islam di atas bisa dilihat sebagai kolaborasi NU dan MUI di satu pihak, dan kerja sama yang baik antara K.H. Ma’ruf Amin dan K.H. Hasyim Muzadi dalam konteks perseteruannya dengan Gus Dur di pihak lain.

### Ketersinggungan Ulama

Membicarakan “kecondongan” NU ke kanan—yang ditandai oleh penentangannya secara keras terhadap Islam liberal dan dukungannya terhadap agenda-agenda kalangan Islamis—semata-mata dari perspektif konflik antarelit NU tentu saja menyederhanakan masalah. Yang juga patut dipertimbangkan adalah potensi konservatisme yang ada di dalam tubuh NU itu sendiri.

Kalau banyak orang melihat liberalisasi pemikiran keislaman semarak di dalam NU, terutama di kalangan generasi mudanya, maka hal itu harus diakui sebagai hasil dari buah liberasi yang ditanam Gus Dur. Sebagai organisasi (*jam’iyah*) dan komunitas sosial (*jama’ah*), pengendali utama NU tetaplah ulama

<sup>32</sup> Penilaian seperti ini setidaknya pernah dilontarkan oleh salah seorang anak muda NU yang saat ini secara pribadi dekat dengan K.H. Ma’ruf Amin kepada saya. Menurutnya, yang terjadi antara K.H. Ma’ruf dengan Gus Dur sesungguhnya adalah konflik pribadi. Dari konflik pribadi ini akhirnya membawa K.H. Ma’ruf melawan gagasan-gagasan yang selama ini diusung Gus Dur, misalnya, *tajdid* (pembaharuan), pluralisme, dan liberasi pemikiran keislaman.

dengan karakter pemikiran keislamannya yang khas. Oleh karena itu, berbicara tentang NU, tidak mungkin untuk tidak membicarakan ulama.

Ulama, atau yang terkadang disebut ulama tradisional, adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan Islam dari lembaga pendidikan Islam tradisional, terutama pesantren. Mereka ahli di bidang keilmuan Islam klasik. Karena itu, mereka merasa sebagai orang yang paling otoritatif untuk berbicara tentang dan atas nama Islam. Salah satu karakteristik utamanya adalah keinginan yang kuat untuk melindungi warisan-warisan pengetahuan Islam klasik. Karakteristik terakhir ini mengindikasikan adanya potensi konservatisme di dalam diri ulama, terlepas dari keberadaan beberapa orang ulama yang memiliki pikiran-pikiran liberal-progresif.<sup>33</sup>

Akan tetapi, konservatisme ulama ini semata-mata bentuk dari upayanya untuk menjaga warisan Islam klasik. Inilah sesungguhnya yang membedakan antara konservatisme ulama dengan konservatisme Islamis. Jika Islamis cenderung untuk menjadi aktivis yang berupaya untuk mengimplementasikan doktrin-doktrin Islam klasik (dalam bahasa modern), maka ulama hanya memperla-

kukannya sebagai warisan pengetahuan Islam klasik yang berguna, yang harus dijaga. Sebagai contoh, salah seorang ulama Pakistan, Mawlana Taqi' Uthmani, menyatakan bahwa makna jihad termasuk juga agresi terhadap negara non-Muslim. Sekilas, ini tampak sebagai jawaban kalangan Islamis-radikal, namun ia sesungguhnya jauh dari kategori tersebut. Masalah sesungguhnya di sini adalah bahwa dia ingin mempertahankan makna jihad dalam pengertian agresi atau perang dengan kalangan non-Muslim karena makna tersebut tertera dalam fiqih Islam dan telah menjadi bagian dari tradisi kesejarahan Islam. Qasim Zaman menyebut posisi ulama dengan istilah "theoretical defense".<sup>34</sup>

Bisa dikatakan di sini bahwa karakter ulama adalah konservatif, tapi *quietist*. Dalam arti bahwa secara keilmuan, ulama cenderung untuk tidak ingin melampaui teks-teks keislaman yang telah diproduksi oleh pemikir-pemikir Islam klasik. Akan tetapi, mereka tidak memiliki kecenderungan untuk berjuang secara politis dalam rangka mengimplementasikannya di dunia kontemporer. Kepentingan mereka adalah menjaga warisan pengetahuan Islam klasik. Konservatisme ulama inilah yang membuatnya sulit untuk

<sup>33</sup> Muhammad Qasim Zaman, "Pluralism, Democracy, and the Ulama," dalam Robert W. Hefner, *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005), hlm. 69. Bandingkan dengan Alexander Bligh, "The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom," dalam Syafiq Mughni (ed.), *An Antology of Contemporary Middle Eastern History*, (Montreal, Quebec, Canada: Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, t.th.).

<sup>34</sup> Zaman, "Pluralism, Democracy, and the Ulama," hlm. 68-69.



menerima gagasan-gagasan Muslim liberal yang menurutnya terlalu leluasa memberi ruang terhadap akal sehingga mereduksi fungsi wahyu. Konservatisme ini juga yang membuat ulama, dalam momen-momen tertentu, menjalin kerja sama dengan kalangan Islamis.

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam studi Qasim Zaman tentang ulama di dunia Islam kontemporer bahwa konservatisme ulama menjadi potensi untuk menjalin kerja sama dengan kalangan Islamis. Kolaborasi ini akan menjadi sesuatu yang riil ketika menghadapi “ancaman” yang ditebarkan oleh kalangan Muslim liberal. Dengan kata lain, ulama dan Islamis meletakkan pemikiran Islam liberal sebagai musuh bersama. Konservatisme keduanya yang secara langsung berhadapan dengan spirit Islam liberal adalah tentang posisi akal manusia. Bagi ulama dan Islamis, akal manusia hanya dapat beroperasi di wilayah yang telah dibatasi oleh wahyu. Itu berarti bahwa rasio manusia hanya boleh berperan di area yang tidak ada ketetapan wahyu secara eksplisit. Dalam masalah ini, Islamis dan ulama memiliki kesamaan pandangan.<sup>35</sup> Dari sinilah mereka melakukan perlawanan bersama terhadap Islam liberal yang dianggap terlalu memberi kesempatan yang luas terhadap rasio sehingga melanggar rambu-rambu wahyu Tuhan yang sudah jelas dan tegas.

Pemikiran Islam liberal memang menjadi musuh bersama bagi ulama dan Islamis. Akan tetapi, mereka sesungguhnya memiliki alasan yang berbeda. Jika ulama menolak Islam liberal karena dianggap membahayakan ajaran Islam “baku”, maka kalangan Islamis menolak Islam liberal terkait dengan penolakannya terhadap segala hal yang berasal dari Barat serta keyakinan mereka bahwa Islam telah mencukupi segalanya. Ditambah lagi dengan keinginan mereka untuk hidup secara Islami, yang itu berarti harus berbeda dengan cara hidup dan cara pikir Barat. Islamis menentang apa yang mereka



al-islam.org

<sup>35</sup> Muhammad Qasim Zaman, *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002), hlm. 172.

anggap sebagai nilai-nilai Barat rasionalisme sekuler yang, dalam pandangannya, hendak menggantikan norma-norma agama. Bahkan, dalam beberapa hal, penentangannya terhadap Muslim liberal adalah karena mereka dianggap sebagai agen Barat yang menyebarkan pikiran-pikiran dan ideologi-ideologi Barat yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>36</sup>

Relasi antara ulama dan Islamis sesungguhnya sangat kompleks dan kontradiktif. Islamis sering menuduh ulama sebagai orang yang tidak paham dengan problem riil dunia modern. Pengetahuan ulama dianggap lembaran-lembaran masa lalu yang tidak memiliki kaitannya dengan berbagai persoalan di tengah masyarakat sehingga mereka tidak mungkin bisa memecahkan problem keumatan. Di sisi lain, ulama sering memandang kalangan Islamis tidak cukup memiliki kualifikasi untuk menafsirkan ajaran-ajaran Islam sehingga mereka tidak layak untuk berbicara atas nama Islam.<sup>37</sup> Akan tetapi, kehadiran Islam liberal membuat kedua kelompok ini menyatu. "Kecerobohan" Muslim liberal dalam memasarkan gagasan-gagasannya memberi andil yang cukup besar dalam

menyatukan kekuatan ulama dan Islamis.

Istilah "kecerobohan" di sini perlu digarisbawahi secara tebal karena bisa jadi gagasan awal Islam liberal lebih ditujukan pada kelompok Islamis-konservatif yang dirasa gerakan-gerakannya semakin membahayakan. Tapi yang tidak terpikirkan oleh kalangan Muslim liberal adalah bahwa gagasan-gagasannya juga menyerang basis intelektual ulama. Ulama yang otoritas keilmuannya berbasis pada wacana Islam klasik yang tertera dalam kitab kuning merasa terusik karena gagasan-gagasan Islam liberal hampir bisa dipastikan berseberangan dengan keislaman klasik yang ada di kitab kuning yang menjadi pegangan ulama.

Artikel Ulil di Kompas, 18 November 2002, mungkin contoh yang tepat untuk menjelaskan hal ini. Artikel yang berjudul "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam"<sup>38</sup> terkesan sangat kuat ditujukan pada kalangan Islamis yang memperlakukan Islam sebagai patung batu, di mana "Islam patung" tersebut hendak diimplementasikan dalam masyarakat kontemporer melalui gerakan syariatisasi Indonesia.<sup>39</sup> Artikel ini sukses memancing kemarahan kalangan Islamis.

<sup>36</sup> Muhammad Qasim Zaman, *The Ulama in Contemporary Islam*, hlm. 171-172.

<sup>37</sup> Lihat Ahmad Aziz, *Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964* (London, Bombay, Karachi: Oxford University Press, 1967).

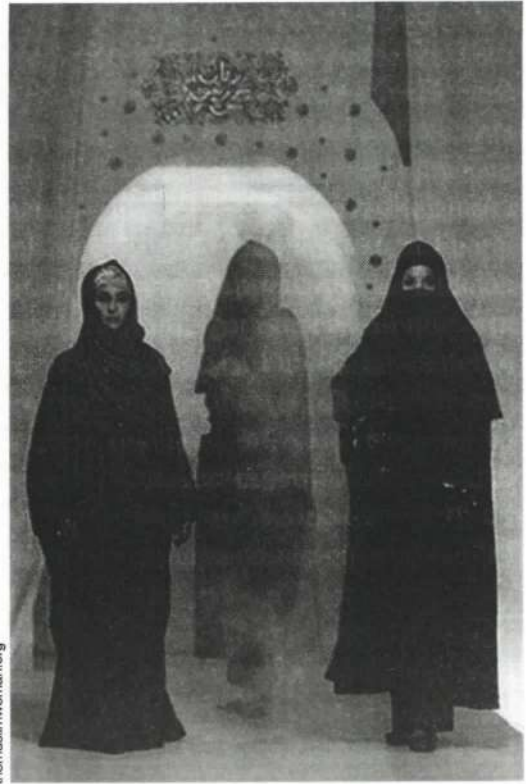
<sup>38</sup> Ulil Abshar-Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," dalam Dzulmanni (ed.), *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005).

<sup>39</sup> Penilaian seperti ini setidaknya pernah dilontarkan oleh K.H. Mustofa Bisri, salah seorang ulama terkemuka NU sekaligus mertua Ulil, dalam artikel yang ditulisnya untuk menanggapi artikel Ulil tersebut. Artikel ini dipublikasikan di Kompas pada 5 Desember 2002. Di dalam artikelnya, beliau menyatakan, "Saya nyaris yakin, saat menulis, di depan Ulil ada bayangan orang-orang berjubah dan



Athian Ali dari FUUI (Forum Ulama dan Umat Islam) Bandung, misalnya, menfatwakan hukuman mati bagi Ulil. Akan tetapi reaksi yang sama juga muncul dari kalangan ulama NU. Rais Syuriah NU Jawa Timur, K.H. Masduqi Machfud, menyatakan bahwa pikiran Ulil adalah sesat. Dari sini, menggelindinglah hujatan terhadap setiap pemikiran yang dianggap sebagai bagian dari paket pemikiran Islam liberal. Gerakan kesetaraan gender yang selama ini bergerilya ke pesantren-pesantren dan mengkritisi konsep kitab kuning yang dirasa tidak menghargai perempuan juga tidak luput dari cap sebagai Islam liberal yang sesat.

Kisah yang sama juga terlihat dalam kasus CLD-KHI (*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*) yang ditulis oleh beberapa Muslim liberal di dalam Departemen Agama. Dengan semangat kesetaraan gender yang kuat, CLD-KHI memuat usulan larangan poligami, menyamakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan, memberi hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan cerai dan rujuk, dll. CLD-KHI tidak hanya melahirkan reaksi keras dari kalangan Islamis, tapi juga kalangan ulama. Ulama merasa CLD-KHI tersebut telah menyerang basis keilmuannya, di mana isi KHI tersebut secara langsung



themuslimwoman.org

bertentangan dengan apa yang selama ini dianggap sebagai ajaran baku dalam fiqih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh NU bahwa ia sesungguhnya tidak mempermasalahkan jika aktifis Islam liberal menganggap tidak bijaksana orang yang berpoligami. Tapi, ketika melarang poligami, itu berarti mereka telah melawan ajaran Al-Qur'an yang membolehkan laki-laki untuk berpoligami.<sup>40</sup>

berjenggot, membawa pedang yang di bayangan Ulil terus meneriakinya agar dia juga berpakaian dan berjenggot seperti mereka jika tidak mau masuk neraka." Baca K.H. Mustofa Bisri, "Menyegarkan Kembali Sikap Islam," dalam Dzulmanni (ed.), *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 165.

<sup>40</sup>Greg Fealy, "A Conservative Turn, Liberal Islamic Groups Have Promoted a Backlash," [islamliberal@yahoogroups.com](mailto:islamliberal@yahoogroups.com), Jum'at, 7 Juli 2006.

Dengan demikian, mendekatnya ulama dengan kalangan Islamis itu terjadi karena mereka menemukan Islam liberal sebagai musuh bersama. Gagasan-gagasan yang diusung oleh Muslim liberal tidak hanya mengenai kalangan Islamis, tapi juga mengguncang sendi-sendi keilmuan yang dijaga oleh para ulama. Dari sini, seluruh agenda keislaman yang dianggap sebagai paket Islam liberal kemudian ditolak tidak hanya oleh Islamis, tapi juga ulama.

Polarisasi antara Islam liberal dengan ulama terlihat jelas dalam Muktamar NU (2004) dan Muhammadiyah (2005) dua ormas Islam terbesar yang selama ini dianggap sebagai penyangga Islam moderat di Indonesia. Jika sebelumnya, dua organisasi ini toleran terhadap gagasan-gagasan Islam liberal, saat ini terlihat arah yang berkebalikan. Langkah berikutnya mudah ditebak. Tanpa disadari, kedua organisasi tersebut semakin mendekat ke agenda yang diusung oleh kalangan Islamis sebagaimana yang terlihat dalam kasus RUU APP dan Perda syariat Islam.

## Penutup

Sampai di sini, kita berharap sudah bisa menjawab pertanyaan utama dalam artikel ini tentang apakah NU telah menjadi bagian dari barisan panjang Islamis? Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa retorika keislaman yang diekspresikan oleh beberapa orang elit NU

untuk mendukung penolakannya terhadap Islam liberal dan dukungannya terhadap agenda kalangan Islamis sesungguhnya adalah "perang mulut" antarelit NU yang tengah berkonflik. Situasi ini mungkin tidak jauh berbeda dengan tulisan Binder bahwa "... seiring berjalannya waktu, perbedaan-perbedaan posisi sosial akan dimanifestasikan dalam politik praktis, dan bahwa kepentingan masing-masing akan dibenarkan dengan perbedaan ideologi."<sup>41</sup>

Dari perspektif yang lain, kedekatan antara NU dengan Islamis lebih banyak dipicu oleh agresifnya kalangan Muslim liberal dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Wacana Islam liberal yang dihadirkan secara sembrono selalu akan menjadi tantangan tidak hanya bagi kalangan Islamis, tapi juga ulama tradisional. Akan tetapi, kedekatan ini bukanlah sebuah *nature* NU yang abadi, tapi hanya bersifat temporer.

Antara NU dan Islamis tidak memiliki latar belakang kesejarahan yang memungkinkan mereka untuk menyatu. Ulama dan Islamis saling menghina sebagai orang yang tidak layak berbicara tentang Islam dan pada saat yang sama mengklaim sebagai pihak yang paling berhak berbicara atas nama Islam. Sangat mudah untuk menemukan kesenjangan yang sulit dijembatani antara ulama dan Islamis, bahkan ketika mereka sedang dianggap menyatu oleh kalangan Muslim liberal.

<sup>41</sup> Binder, *Islam Liberal...*, hlm. 512.



Karakter dasar keislaman kalangan Islamis adalah puritanis. Hal ini dengan sendirinya akan berhadapan dengan sikap keberagamaan NU yang lebih toleran terhadap praktik-praktik ritual populer dan berbagai tradisi lokal. Corak keberagamaan NU ini mudah mengundang kecaman pihak Islamis. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dalam tulisan Hartono Ahmad Jaiz yang mengkritik posisi istimewa kiai di dalam komunitas NU.<sup>42</sup> Jaiz bahkan tidak segan-segan untuk mengkategorikan cara-cara keberagamaan NU sebagai bagian dari aliran dan paham sesat yang ada di Indonesia. Dengan mengaitkan cara keberagamaan NU tersebut dengan kecenderungan liberal anak-anak muda NU, Jaiz dengan tegas menyatakan, "Terserah saja, biar lebih jelas amburadulnya keyakinan mereka."<sup>43</sup>

Sementara, K.H. Ma'ruf Amin yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai ulama NU yang sangat dekat dengan kelompok Islamis, ternyata tetap seorang ulama NU yang moderat. Hal ini terlihat dalam Munas Alim Ulama NU 2006. Pada saat itu, K.H. Ma'ruf Amin menjadi salah satu arsitek materi Munas, di mana Munas pada akhirnya menghasilkan rumusan *fikrah nahdliyyah* yang bisa dilihat sebagai oposisional dengan spirit kalangan Islamis-konservatif. Lima *fikrah nahdliyyah* adalah moderat (*tawassuthiyah*), toleran (*tasâmmuhiyah*), reformatif (*ishlâhiyah*), dinamis (*tathawwuriyah*), dan metodologis (*manhajiyah*). *Fikrah nahdliyyah* ini memperlihatkan bahwa NU tetap berada di *track*-nya semula, Islam moderat. *Wallahu a'lam.* ❖

<sup>42</sup> Hartono Ahmad Jaiz & Abduh Zulfidar Akaha, *Bila Kyai Dipertuhankan: Membedah Sikap Beragama NU* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

<sup>43</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 266.